

Pola Komunikasi Politik: Studi Pilkada Gubernur Gorontalo

Erwin Jusuf Thaib & Abdul Razak Mozin

Universitas Bina Nusantara Jakarta , IAIN Sultan Amai Gorontalo

erwinthaib7578@gmail.com, zack.pshp@yahoo.com,

Abstract:

This study is about to reveal how political communication of Golkar Party actors in Gorontalo Governor Election of 2011. The results of this study indicate that the strength of Golkar's political communication performance in Gorontalo Governor Election in 2011 is on party communicators and actors. Where the model of political communication occurs at several levels, namely; (a) the individual level, Rusli Habibie-Idris Rahim managed to manage the impression in each of them well. (b). At the group level, it is clear how Rusli Habibie-Idris Rahim managed to manage his political communications with harmonization in policy sharing and political talks. (c) at the organizational level impacted further from the group level, ie how Golkar and PPP determine the political direction of the party that position itself as the defender of the people; and (d) At the mass level, the Golkar Party is melting in coalition partners with the PPP, so the Gorontalo public sees any positive value from Golkar and PPP. Golkar and PPP always get a positive score. This is because Rusli Habibie-Idris Rahim always advances as a public policy advocate.

Abstrak

Studi ini mengungkap komunikasi politik aktor Partai Golkar dan PPP dalam Pilkada Gubernur Gorontalo 2011. Ditemukan bahwa kekuatan kinerja komunikasi politik partai Golkar dan PPP dalam Pilkada Gubernur Gorontalo 2011 pada komunikator dan aktor partai. Model komunikasi politiknya melalui beberapa level, (a) Level individual, Rusli Habibie-Idris Rahim berhasil mengelola kesan dalam dirinya secara baik. (b). Level kelompok, terlihat bagaimana Rusli Habibie-Idris Rahim berhasil mengelola komunikasi politiknya melalui harmonisasi dalam berbagi kebijakan dan pembicaraan politik. (c) Level organisasi, yakni bagaimana Golkar dan PPP menentukan arah politik partainya sebagai pembela rakyat; dan (d) Level massa, Partai Golkar menjadi lebur dalam mitra koalisi dengan PPP, sehingga publik Gorontalo melihat setiap nilai positif dari Golkar dan PPP karena Rusli Habibie-Idris Rahim selalu maju sebagai pembela kebijakan publik.

Kata kunci: Komunikasi, Politik, Pilkada, Gorontalo

A. Pendahuluan

Semenjak Gorontalo ditetapkan menjadi provinsi pada tahun 2000, maka pesta demokrasi terutama pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur telah 4 empat) kali dilaksanakan. Sebelumnya pemilihannya dilakukan oleh DPRD pada tahun 2001, namun sejak diberlakukannya Pilkada langsung di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004¹, maka tiga Pilkada Gubernur Gorontalo pemilihannya langsung oleh masyarakat yakni pada tahun 2006, 2012, dan 2017. Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis.²

Pergeseran pemilihan yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD beralih menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat menuntut masing-masing partai politik, baik aktor maupun kandidatnya untuk lebih kreatif terutama dalam mengoptimalkan fungsi komunikasi partai politik. Bahkan para aktor politik dituntut menjadi aktor politik kontemporer untuk bisa mencitrakan diri sebaik mungkin. Aktor politik kontemporer diharuskan mengembangkan strategi media yang sukses demi tujuan popularitas bagi pencapaian target audiensi.³

Komunikasi politik menjadi hal yang penting bagi para aktor dan kandidat yang akan maju dalam Pilkada terutama partai politik. Sebab keberhasilan partai dalam pemilukada sangat ditentukan sejauh mana komunikasi politiknya berfungsi. Selain itu juga berfungsinya komunikasi politik dengan baik akan menjadikan partai tersebut mampu bersaing dalam alam demokrasi yang semakin kompetitif.

Pengelolaan komunikasi politik partai saat ini sangat penting untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan partai kepada khalayak sebagai sebuah dinamika demokrasi. Karena parpol dalam sistem politik merupakan pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, bahwa tidak akan pernah terwujud demokrasi tanpa partai politik. Namun parpol yang

¹Evi Ariadne Shinta Dewi, *Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik)* dalam *Jurnal Komunikasi* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 h.89

²Hardiyanto, dkk, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)* dalam *Jurnal Varia Justicia* Volume 12 Nomor 1 Tahun 2016, h. 210

³Syamsul Asri, *Aktor Politik Kontemporer dalam Konteks Psychocultural*, dalam *Jurnal Politik Profetik* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, h. 4

diharapkan adalah parpol yang sehat dalam arti bahwa partai tersebut memainkan fungsi idealnya dalam sistem politik negara, karena dengan parpol yang sehat memungkinkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi politiknya.⁴ Di mana fungsi-fungsi parpol tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, dan komunikasi politik.⁵

Fungsi-fungsi parpol tersebut hanya dapat dipahami melalui pengartikulasian kepentingan (*interest articulation*). Misalnya saja fungsi partai sebagai sarana sosialisasi politik (*political socialization*) adalah untuk membangun citra (*image*) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan politik (*political recruitment*) berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*) adalah menyalurkan berbagai kekuatan ideologi maupun kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*) adalah mensosialisasikan ide, gagasan, visi dan kebijakan partai kepada masyarakat, termasuk juga kepada lembaga pemerintahan.⁶ Keberhasilan parpol melaksanakan fungsi-fungsinya akan memberikan keuntungan politik bukan saja bagi parpol, namun juga bagi aktor-aktor parpol itu sendiri. Untuk melihat sejauhmana parpol mengoptimalkan fungsi-fungsinya terutama fungsi komunikasi politik adalah pada saat pelaksanaan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi.⁷ Pada era Reformasi hampir semua aktor (politisi) maupun parpol dapat melaksanakan fungsi komunikasi politik secara baik.

⁴Adman Nursal, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu; Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden* (Jakarta; Gramedia, 2004), h 15-17.

⁵Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005), h. 55-70.

⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, Grasindo: 1999) h. 161-171

⁷Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada* dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, h. 36. Lihat pula, Pandri S. Itiniyo, *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2011* dalam Jurnal Lex Privatium Volume IV Nomor 3 Tahun 2016, h.28

Komunikasi politik terutama oleh aktor-aktor parpol sangat berperan dalam memenangkan partainya. Pelaksanaan komunikasi politik secara optimal sangat menentukan keberhasilan dan dukungan dari masyarakat sebagai pemilik suara.

Berbagai keberhasilan yang diperoleh oleh masing-masing parpol maupun aktor politik dalam pemilu sangat ditentukan sejauhmana komunikasi politik dapat dilaksanakan secara optimal. Ini berarti bahwa optimalisasi komunikasi sama penting dengan tujuan politik yang ingin dicapai. Hal ini juga dikemukakan Deddy Mulyana⁸, dengan mengatakan bahwa apabila komunikasi dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan hasil yang baik, termasuk akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari komunikasi itu sendiri.

Sebenarnya keberhasilan komunikasi oleh aktor-aktor politik bukan saja akan mewujudkan tujuan politik dari aktor-aktor itu sendiri, namun keberhasilan tersebut dapat mewujudkan tujuan politik yang lebih besar, yaitu dukungan masyarakat terhadap parpol maupun aktor-aktor politiknya dalam mengikuti pemilihan gubernur, pilpres, dan sterusnya. Perubahan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah suatu perjuangan politik dari seluruh komponen masyarakat Indonesia terutama peran dari para aktor-aktor politik di DPR yang berhasil melakukan amandemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu. Sementara itu keberhasilan para aktor-aktor partai tersebut adalah tidak lepas dari fungsi komunikasi politik yang dilakukan secara optimal.

Banyak cara untuk mencapai tujuan politik antara dengan perebutan pengaruh, di mana komunikasi merupakan cara yang paling demokratis dibandingkan dengan cara lainnya seperti melalui uang, jabatan, dan militer. Pandangan ini sangat tepat, apabila dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Periode tahun 2012-2017. Sebab keberhasilan komunikasi partai politik dalam Pilkada ternyata tidak hanya ditentukan oleh figur/kandidatnya, namun bagaimana pengelolaan komunikasi politik oleh aktor-aktor partai, sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dalam perspektif ini, maka menarik untuk dikaji bagaimana komunikasi politik para kandidat maupun partai politik dalam pilkada

⁸Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 1.

Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2011. Terutama komunikasi politik para aktor politik dari pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim. Sebab pasangan ini mampu mengalahkan pasangan *incumbent*, yaitu Gusnar Ismail dan Tony Uloli, bahkan pasangan ini didukung penuh oleh gabungan partai dan partai penguasa serta mesin birokrasi. Namun dalam realitasnya pasangan ini tidak berhasil memenangkan pilkada saat itu (tahun 2011). Disinilah pentingnya pengkajian ini dilakukan, yaitu ingin menganalisa bagaimana komunikasi politik para aktor Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2011.

Artikel ini merupakan intisari dari hasil penelitian lapangan, yaitu melihat bagaimana komunikasi politik aktor Partai Golkar dalam pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas data yang bersifat deskriptif, serta gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo. Alasan mendasar dipilihnya kota sebagai lokasi penelitian ini lebih dikarenakan aktor Partai Golkar dan PPP termasuk kandidat Gubernur (Rusli Habibie dan Idris Rahim) berdomisili di Kota Gorontalo. Selain itu tempat/kantor yang digunakan untuk menyusun berbagai strategis kampanye politik pasangan ini banyak dilakukan di Kota Gorontalo. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang dihasilkan akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat deskriptif, yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

B. Diskursus Komunikasi Politik

Secara umum, komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik.⁹ Istilah komunikasi politik mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond (1960) dalam bukunya yang berjudul *The Politics of the Development Areas*, dia membahas

⁹Eko Harry Susanto, *Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2 Desember Tahun 2013, h.164

komunikasi politik secara lebih rinci.¹⁰ Proses komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan. Lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik.¹¹ Komunikasi politik merupakan sebuah studi yang multi disiplin ilmu, terutama dalam kaitannya antara proses komunikasi dan proses politik. Dalam konteks politik mengacu pada pendapat Graceau dalam Dan Nimmo(2005), proses politik merupakan pola interaksi yang menghubungkan antara warga negara dengan pembuat keputusan baik dalam konteks, kesetaraan, kerjasama ataupun dalam konteks konflik.¹² Hal ini dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik. Sedangkan menurut Alfian (1993) sebagaimana dikutip Yudhatama menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari sistem politik yang mengkonversikan aspirasi dan kepentingan para pihak menjadi berbagai kebijakan.¹³

Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai *neologisme*, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.¹⁴

Komunikasi politik (*political communication*) dapat dipahami dalam beberapa definisi. McQuail¹⁵ misalnya mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan “*all processes of information (including facts, opinions, beliefs, etc) transmission, exchange and search engaged in by participants in the course of institutionalized political activities*”.

¹⁰Yusa Djuyandi, *Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto dalam Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016-2021* dalam Jurnal Wacana Politik Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, h.13

¹¹Rosiana Eka Putri, *Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis*, dalam Jurnal Jurisprudence Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2015, h. 52

¹²Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator*, h. 83

¹³Iranda Yudhatama, *Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY* dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15 Nomor 3 Tahun 2017, h. 207

¹⁴Budiyono, *Media Sosial dan Komunikasi Politik : Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017* dalam Jurnal Komunikasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2016, h. 48

¹⁵Dennis McQuail, “*Political Communication*” dalam Maurice Kogan (ed), *Encyclopedia of Government and Politics Vol. 1*. (London: Routledge, 1992), h 472-473.

Dalam uraian ini McQuail mengatakan bahwa sebenarnya semua proses penyampaian informasi – termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para partisipan dan konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga. Tentunya pandangan McQuail ini menekankan pada beberapa hal yang penting, yaitu komunikasi politik menandai keberadaan dan aktualisasi lembaga-lembaga politik, komunikasi politik merupakan fungsi dari sistem politik, dan komunikasi politik berlangsung dalam suatu sistem politik tertentu.

Berkaitan dengan komunikasi politik sebagai suatu sistem politik, Gabriel Almond¹⁶ mengemukakan bahwa komunikasi adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “*All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication.*” Artinya bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara *inherent* di dalam setiap fungsi sistem politik. Lebih lanjut Almond berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik di suatu negara.¹⁷

Sementara itu Dan Nimmo¹⁸ mengatakan bahwa: “*Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict.*” Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, media, khalayak, dan akibat.

Sedangkan Meadow¹⁹ memberikan penegasan bahwa istilah komunikasi merujuk pada “*any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the*

¹⁶ Gabriel A. Almond dan James S. Coleman (Eds), *The Politicis of the Developing Areas*, (Princeton University Press, Prenceton, New Jersey, 1960), h 30-35.

¹⁷Eko Harry Susanto, *Komunikasi Politik dan Jajak Pendapat dalam Pemilihan Kepala Daerah*, dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Tahun 2016, h.177

¹⁸Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator*, h 75-78.

¹⁹Robert G. Meadow, *Politics As Communication*, (Noorwod, NJ: ABLEX Publishing Company, 1980), h 4.

political system.” Artinya bahwa segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik (pesan verbal maupun non verbal), yang dapat mempengaruhi rakyat ataupun pemegang kekuasaan dalam suatu sistem politik. Atau dalam arti lain komunikasi politik merupakan jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti dalam rangka mencapai tujuan politik.

Komunikasi politik diperan oleh aktor komunikasi yang sering disebut “Komunikator Politik”. Komunikator politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Namun, yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politis mereka. Mereka adalah *pols*, yakni politisi yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan *vols*, yakni warganegara yang aktif dalam politik secara *part timer* ataupun sukarela. Jadi komunikator politik adalah pihak yang memanipulasi komunikasi untuk meraih keuntungan politik yang sebesar-besarnya, baik itu hanya melibatkan dirinya sendiri maupun pihak lain yang memiliki ide dan pandangan yang sama.

Komunikator politik utama memainkan peran sosial yang utama, istimewa dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan “teori pelopor mengenai opini publik”, yakni opini publik seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik.²⁰

Komunikator politik terdiri dari tiga kategori: politisi, profesional, dan aktivis. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, seperti aktivis parpol, anggota parlemen, menteri, dan sebagainya. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang uncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi

²⁰Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, h. 34

konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari *jurnalis* (wartawan, penulis) dan *promotor* (humas, jurubicara, jurukampanye, dsb.).²¹

Aktivis sebagai komunikator politik dibagi dua; (a) jurubicara (*spokesman/spokeswoman*) bagi kepentingan terorganisasi, tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis. Dan (b) Pemuka pendapat (*opinion leader*), yaitu orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan informasi politik dari media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal masyarakat kharismatis, atau siapa pun yang dipercaya publik.

C. Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Politik

Fenomena komunikasi politik dapat dilihat dari pandangan teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya padadiri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan.²² Sebab dalam proses pemilihan pemimpin (mulai dari presiden sampai di level paling rendah) pertukaran pesan dilakukan melalui berbagai atribut atau simbol-simbol dari masing-masing partai politik maupun aktor politik. Misalnya, pada saat kampanye simbol-simbol, bendera partai banyak menggunakan gambar/foto dari para aktor politik. Penggunaan simbol-simbol tersebut menurut Eep Saefullah Fattah dalam Lely Arrianie (2010)²³ adalah ingin terlihat menonjol. Di mana penonjolan semacam ini ternyata sangat bersifat simbolik sehingga teori interaksi simbolik sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menggali berbagai pengertian tentang kehidupan kelompok manusia dengan fokus sentralnya tentang interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan untuk mempertukarkan pesan-pesan politik dalam pemilihan Presiden pada Pemilu 2009.

Teori interaksi simbolik pada dasarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, di mana tokoh utamanya adalah George Herbert Mead. Dalam bukunya yang

²¹Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, h. 30

²²Oki Cahyo Nugroho, *Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Budaya* dalam Jurnal Aristo Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015, h. 4

²³Lely Arrianie, *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik* (Bandung, Widya Padjadjaran: 2010) h. 28

berjudul *Mind, Self and Society*, Mead²⁴ mengungkapkan bahwa keseluruhan sosial mendahului pemikiran individu baik secara logika maupun secara temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri adalah mustahil secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial. Menurut Mead kelompok sosial muncul lebih dulu, dan kelompok sosial menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri.

Esensi dasar dari teori Mead²⁵ adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Jay G. Blumler (1979) mengintegrasikan gagasan-gagasan interaksi simbolik dengan John Dewey, William I. Thomas dan Charles H. Cooley. Gagasan mereka tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Hal ini didasarkan pada tiga asumsi, yaitu : *Pertama*, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanistik, tidak pula bergantung bagaimana eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, individu adalah yang dipandang aktif menentukan lingkungan mereka sendiri.²⁶

Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, dan gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya, logis antara nama atau simbol dengan objek yang dirujuknya meskipun kita terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

²⁴George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Penegtauhan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) h.272-273

²⁵Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2001) h. 68-73

²⁶Salomon Gavriel, *Of Mind and Media, How Culture's Symbolic Forms Affect Learning and Thinking* dalam *Bloomington Volume 78* Iss. 5 Tahun 1997 h. 375-380

Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespons ucapan atau tindakan mereka. Proses pengambilan-peran tertutup (*covert role-taking*) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan terbuka, menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tindakan tertutup.

Ketiga asumsi tersebut di atas, disimpulkan Blumler dalam tiga premis, yaitu: (a) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu, (b) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (c) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Seperti yang ditegaskan Blumler, maka perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek.²⁷

Persepektif interaksi simbolik menurut Howard Becker dalam Roscoe C. Hinkle²⁸ menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Defenisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri sendiri menurut Douglas²⁹ ditentukan oleh perilaku mereka sendiri. Karena itu manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka, dan tidak digolongkan sebagai kebutuhan dan dorongan impuls (hati), tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Bagi Blumler³⁰ proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan

²⁷Engkus Kuswarno, *Fenomenologi, Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Widya Padjadjaran: 2009) h. 113

²⁸Roscoe C. Hinkle, *Howard Becker's Approach to The Study of Social Change* dalam *The Sociological Quarterly* Volume 2 Nomor 3 (Juli 1961) h. 155-180

²⁹Mary Douglas, *Natural Symbols, Explorations in Cosmology* (London, Routledge: 1973) h. 216

³⁰Gary S. Becker, *Human Capital, Fertility, and Economic Growth* dalam *Journal of Political Economy*, Volume 98 Nomor 5 October 1990, h. 6

dan menengakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial³¹.

Berkaitan dengan teori interaksi simbolik ini, maka George Ritzer dalam Mulyana (2001)³² meringkas teori ini kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berpikir.
2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.
4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia.
5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan ketiga premis dan ringkasan teori di atas, menurut Engkus Kuswarno³³ terdapat esensi bahwa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna merupakan suatu aktivitas yang khas di antara manusia. Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia akan membentuk masyarakat. Karena manusia secara aktif membentuk perilakunya sendiri. Kesadaran dan pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.

³¹Deddy Mulyana (2001), *Ilmu Komunikasi*, h. 70

³²Deddy Mulyana (2001), *Ilmu Komunikasi*, h. 73

³³Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, h. 114

Berkaitan dengan kemampuan manusia untuk dapat merespon simbol-simbol di antara mereka berinteraksi, menurut Mead³⁴ membawa penjelasan interaksi simbolik kepada konsep tentang diri (*self*). Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan penelitian ini. Karena konsep Mead tentang diri yang lebih menekankan pada konsep “pengambilan peran orang lain” (*taking the role of the other*), atau penjabaran “diri sosial” (*social self*) adalah dilakukan melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial.

Dengan demikian, maka konsep diri sebagai suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain dapat diterapkan dalam proses komunikasi politik antaraktor politik, atau di luar aktor politik Partai Golkar. Di samping konsep diri ini, juga interaksi sosial individu melalui makna maupun simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal maupun non verbal sangat relevan dalam penelitian ini. Karena bagi partai politik simbol-simbol menjadi penting dalam pemilihan Kepala Daerah, terutama dalam setiap kampanye politik. Demikian juga dalam pidato-pidato politik, kampanye politik, baik melalui media maupun dialog langsung atau melalui debat politik, simbol tersebut selalu digunakan masing-masing kandidat dan pendukungnya. Ini membuktikan bahwa penggunaan simbol-simbol tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Bahkan simbol-simbol tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap partai politik saja, namun keberhasilan seorang kandidat dalam mendapatkan dukungan masyarakat pada saat kampanye adalah sangat ditentukan oleh sejauhmana pengeloan berbagai simbol dan makna yang dikonstruksikan dalam realitas komunikasi politik oleh para aktor politik.

D. Komunikasi Aktor Politik dalam Komunikasi Politik Pilkada Gubernur Gorontalo Tahun 2011

Pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada 2011 tidak diperhitungkan untuk menang, sebab lawan yang dihadapinya Gusnar Ismail dan Tony Uloli adalah pasangan *incumbent* yang didukung oleh partai penguasa (Partai Demokrat dan partai pendukungnya). Namun dalam realitasnya pasangan ini memperoleh dukungan masyarakat yang signifikan.

Kemenangan ini tidak terlepas dari mesin politik partai dan komunikasi politik tim pemenangan pasangan Rusli Habibie dan Idris

³⁴Deddy Mulyana (2001), *Ilmu Komunikasi*, h. 73.

Rahim. Selain itu juga kemampuan komunikasi kedua tokoh merupakan faktor penting keberhasilan pasangan ini sehingga mendapatkan dukungan masyarakat pada saat pemilukada Gubernur dan Wagub tahun 2011.

Secara politik pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim merupakan komunikator politik yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Misalnya, Rusli Habibie selain sebagai Bupati Gorontalo Utara juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Sedangkan Idris Rahim selain sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, juga sebagai salah satu yang ditokohkan dan berpengaruh di DPW Partai Persatuan Pembangunan/PPP Provinsi Gorontalo.

Kedudukan yang strategis yang diperankan Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai komunikator dalam partai politik maupun pemerintahan memberikan dampak positif, sehingga pada pemilukada 2011 pasangan ini mendapatkan dukungan masyarakat. Artinya kedua sosok ini memiliki kemampuan sebagai pemimpin di partai politik dan pemerintahan. Kepemimpinan keduanya menciptakan hubungan yang kuat antar elit partai politik. Hubungan yang kuat tersebut, kental dengan nuansa dan semangat optimisme

Terpilihnya Rusli Habibie dan Idris Rahim menjadi Gubernur dan Wagub Gorontalo, lebih cenderung didorong oleh posisi yang diraih sebelumnya sebagai tokoh utama partai, dan juga Rusli Habibie adalah tokoh dalam hal ini Bupati Gorontalo Utara Periode 2008 – 2012, sedangkan Idris Rahim adalah Setda Provinsi Gorontalo 2006 – 2012. Keadaan ini menciptakan trend positif dalam melakukan komunikasi politiknya. Kondisi tersebut sebagai perimbangan kekuatan politik yang mendukung. Terlebih Gubernur dan Wagub Gorontalo terpilih merupakan tokoh masyarakat dan tokoh Partai Golkar dan Partai PPP.

Rusli Habibie dan Idris Rahim berada pada posisi yang kuat. Sebagai sosok pendukung terbesar kerakyatan keduanya berada pada posisi utama. Tak pelak, posisi Rusli Habibie dan Idris Rahim tersebut begitu nampak pada aspek yang mempengaruhi kemenangan mereka. Aspek tersebut adalah ikatan hubungan (*relationship*), penilaian (*judgment*), kepentingan (*interest*), tindakan yang sepatutnya (*proper exercise*). Ikatan hubungan Rusli Habibie dan Idris Rahim (Golkar dan PPP) menumbuhkan atau mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota partai yang ada di kedua partai tersebut.

Keterpilihan Rusli Habibie dan Idris Rahim ditunjang oleh kinerja komunikasi politik yang terlihat dalam beberapa level sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

| No | Level | Analisis |
|----|------------|--|
| 1 | Individu | Pada level ini melihat bagaimana sosok Rusli Habibie dan Idris Rahim di level individu melakukan komunikasi politik. Pada level ini dilihat bagaimana Rusli Habibie atau Idris Rahim pada aspek motivasi, otoritas ataupun kredibilitas. Dalam analisis ini dilihat aspek-aspek yang menyebabkan konsolidasi berhasil maka salah satu kekuatan kinerja komunikasi politik Partai Golkar dan PPP terdapat pada komponen komunikator. Di dalam Partai Golkar dan PPP terdapat komunikator utama yakni Rusli Habibie dan Idris Rahim. |
| 2 | Kelompok | Pada level kelompok, komunikasi yang terjadi pada lingkaran elit Partai Golkar dan PPP mulai solid. Hal tersebut disebabkan adanya kesamaan kepentingan. Elit partai Golkar dan PPP mengusahakan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Gorontalo kepada publik senantiasa produktif. Harmonisasi antar komunikator Partai Golkar dan PPP dalam hal ini Rusli Habibie dan Idris Rahim kental sekali dengan kebersamaan kepentingan baik dari sisi Rusli Habibie sebagai perwakilan Partai Golkar dan Idris Rahim sebagai perwakilan Partai PPP yang merupakan bagian dari koalisi. Partai Golkar berada dalam keyakinan berkoalisi dengan Partai PPP. Terutama pada saat munculnya pencalonan Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai Cagub dan Cawagub Gorontalo. |
| 3 | Organisasi | Pada level organisasi terkena dampak lanjutan dari level kelompok, yakni bagaimana Golkar dan PPP menentukan arah politik partainya yang memposisikan diri sebagai pembela rakyat. Kondisi ini menunjukkan Partai Golkar dan PPP sedang mengalami harmonisasi organisasi. Keinginan untuk menentukan cagub dan cawagub dari Golkar dan PPP tepat pada |

| | | |
|---|-------|--|
| | | waktunya. Hal ini menunjukkan keyakinan yang mantap. Terlihat bahwa Partai Golkar dan PPP telah mengeluarkan begitu banyak energi positif untuk komunikasi politiknya. Kekuatan-kekuatan dalam partai itu dikeluarkan untuk menyatukan konsentrasi dan kekuatan Golkar dan PPP. |
| 4 | Massa | Partai Golkar menjadi lebur dalam mitra koalisi dengan PPP, sehingga publik Gorontalo melihat nilai positif dari Golkar dan PPP. Golkar dan PPP selalu mendapatkan nilai positif. Ini dikarenakan Rusli Habibie-Idris Rahim selalu maju sebagai pemimpin kebijakan publik. Pada level ini pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim memperlihatkan kepada khalayak bahwa mereka layak memimpin Gorontalo. |

Komunikasi politik aktor partai Golkar dan PPP, terutama para tokoh partai pada saat menjelang Pilkada gubernur dan wakil gubernur Gorontalo 2011 sangat memuaskan. Hal ini diakibatkan oleh munculnya tokoh-tokoh partai yang seirama ketika harus menyelaraskan irama komunikasi politik dengan Rusli Habibie-Idris Rahim dalam pencalonan Gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Pada saat itu terlihat Partai Golkar dan PPP telah menuangkan energi dalam menentukan kesepakatan. Kondisi tersebut menjadi faktor yang paling utama dalam mendorong dan mendukung komunikasi politik Partai Golkar dan PPP.

Baiknya komunikasi politik Partai Golkar dan PPP pada saat itu dapat dipahami karena Partai Golkar dan PPP berada pada posisi yang kondusif. Golkar dan PPP sebagai pendukung pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim. Kondisi ini mengakibatkan citra Partai Golkar dan PPP menguat. Hal tersebut terbukti pada hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga di Gorontalo. Citra partai Golkar dan PPP selalu baik oleh responden. Responden menilai, baik dalam hal pemberantasan korupsi, program dan kepeduliannya terhadap rakyat.

1. Pesan Politik Partai Golkar dan PPP Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Kesuksesan komunikasi politik Partai Golkar dan PPP sangat ditentukan oleh keberhasilan pesan-pesan yang disampaikan dan mendapat respons positif dari publik atau massa berupa kesediaan memberikan simpati dan dukungan politik kepada Partai Golkar dan PPP untuk mendukung Rusli Habibie-Idris Rahim.

Pesan-pesan politik Partai Golkar dan PPP menjelang Pilgub dan wagub Provinsi Gorontalo tahun 2011 sudah dimulai sejak lama. Pesan politik Partai Golkar dan PPP menyangkut isu-isu bidang ekonomi, sosial hingga politik. Isu-isu tersebut sangat penting dalam pesan politik adalah membentuk pencitraan partai.

Partai Golkar dan PPP memberi mandat kepada Rusli Habibie-Idris Rahim untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2011. Partai Golkar dan PPP merupakan partai yang secara kultur cukup dekat satu sama lain. Popularitas partai dan calon menanjak karena gencar beriklan di berbagai media lokal maupun nasional. Pesan politik yang disampaikan untuk pemilu Gubernur Gorontalo sampai dengan tepat kepada kognisi khalayak Gorontalo. Pesan politik yang disampaikan memberi efek hipnotis dan dorongan emosional yang bisa memenangkan hati atau pikiran khalayak Gorontalo.

Pesan pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim memajukan pesan citra-Islam yang kemudian ditangkap dengan menampilkan pasangan ini yang mengenakan busana muslim. Foto-foto ini ingin menunjukkan betapa pasangan ini dekat dengan kehidupan Islam. Pesan ini mendapat perhatian pada kognisi publik Gorontalo. Pesan lain, pasangan ini membawa pesan sebagai pasangan pemimpin yang akan membawa pada kemandirian Gorontalo. Pesan ini ingin menunjukkan betapa Provinsi Gorontalo bisa menjadi Provinsi yang jaya dan bermartabat. Pesan itu ditangkap sebagai pesan yang baik dan masyarakat Gorontalo menyambut dengan antusias.

Citra yang dimajukan Rusli Habibie-Idris Rahim adalah kinerja, cepat mengambil keputusan demi kepentingan rakyat Gorontalo. Selama ini dalam pelbagai kebijakan pemerintah ketika menjabat sebagai Bupati dan Sekda keduanya memang cepat dan tanggap. Secara umum pesan yang disampaikan dalam kampanye pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim atau Partai Golkar dan PPP cenderung mendukung nilai yang diyakini secara umum oleh

masvarakat Gorontalo. Keduanya senantiasa lebih bekerja secara kompak dan saling memberikan gereget pesan yang baik. Tim sukses keduanya menghadapi pelbagai kampanye Pilkada yang mendukung keduanya.

Dalam kampanye Pilkada ini, para juru kampanye menempatkan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai calon yang dimajukan Golkar dan PPP sebagai tokoh yang akan melakukan hal-hal perubahan setelah terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Pesan-pesan kampanye ini dapat mencitrakan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai calon pemimpin daerah yang pro masyarakat, sehingga masyarakat pemilih menganggapnya sebagai pilihan yang tepat. Sangat wajar jika kemudian perolehan suara pasangan ini meningkat dari perkiraannya.

2. Simbol yang Membentuk Pencitraan Partai

Politik pencitraan sangat terkait erat dengan simbol-simbol yang dibangun partai, baik dari lambang, ideologi, slogan, maupun simbol-simbol lain. Penggunaan “pencitraan” sebagai salah satu cara melanggengkan kekuasaan seiring mekanisme hasrat sebagai mesin penggerakannya.³⁵ Dalam konteks Pilkada Gubernur Gorontalo tahun 2011, Simbol Partai Golkar dan PPP sebagai partai pendukung utama calon, lebih dikenal sebagai Simbol Islam yang muncul dalam tema komunikasi politik. Keduanya memilih untuk mendekatkan jarak dengan simbol Islam. Simbol lain yang dimunculkan oleh Golkar dan PPP adalah sebagai partai yang bersih dari korupsi. Simbol ini dimunculkan sebagai pembersih dari banyaknya kasus korupsi yang muncul di Partai Golkar dan PPP. Pasangan ini selalu memunculkan dalam pesannya sebagai pasangan yang bersih sehingga mengharapkan kemenangan yang bersih. Simbol ini ditangkap secara positif oleh pengurus Golkar dan PPP karena justru hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam dunia politik. Hal ini yang kemudian memunculkan dukungan dari pengurus kedua partai sebagai kepada Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

Simbol dalam komunikasi politik Partai Golkar dan PPP tampak berhasil, bahkan menjadikan hubungan interpersonal keduanya dengan pengurus partai menjadi harmonis karena simbol-

³⁵Nila Sastrawati, *Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik*, dalam Jurnal Al-Daulah Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015, h.169

simbol tersebut sangat produktif bagi Partai Golkar dan PPP, terutama dalam meraih dukungan publik.

3. Partai Golkar dan PPP dengan Khalayak

Khalayak dalam pembahasan ini adalah masyarakat umum atau masyarakat awam dan khalayak konstituen di mana khalayak ini merupakan khalayak yang diperkirakan menjadi simpatisan atau anggota dari partai Partai Golkar dan PPP .

a. Khalayak Umum

Kemenangan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam pilkada 2011 adalah pasangan yang maju dengan latar belakang sebagai aparat pemerintahan. Pasangan ini didukung partai Golkar dan PPP yang sanggup mengalahkan pasangan lain. Fenomena ini membuktikan dukungan politik masyarakat Gorontalo begitu besar pada Golkar dan PPP. Kemenangan ini memperlihatkan bahwa Partai Golkar dapat membangun komunikasi politik yang efektif dan menjadikan PPP bisa berdampingan dan meraih kemenangan. Ini yang menjadi kekuatan Partai Golkar dan PPP dalam mengakumulasi suara dalam pilkada Gorontalo tahun 2011.

Khalayak umum di Gorontalo cenderung mempersepsikan pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai representasi nasionalisme religius. Ide nasionalisme religius³⁶ sendiri sesungguhnya bukan ide baru, Golkar sesungguhnya telah melakukan itu dengan upaya menghilangkan politik aliran di era Orde Baru secara berhasil dengan mengajukan konsep karya sebagai ideologi. Masyarakat yang sudah lelah dengan politik propaganda revolusi dari Soekarno itu pun kemudian tertarik kepada

³⁶Nurcholish Madjid mendefinisikan nasionalisme religius dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai sintesis nasionalisme kebangsaan dengan Islam. (Lihat Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1998, hlm. 172). Nasionalisme religius dalam konteks Pilkada Gubernur Gorontalo Tahun 2011 disematkan pada pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim karena beberapa faktor antara lain dari asal partai masing-masing. Partai Golkar adalah partai dengan platform nasionalis dan PPP adalah partai dengan platform Islam. Selain itu, penamaan ini juga merujuk pada personifikasi individu dari pasangan ini. Rusli Habibie sebagai seorang pengusaha dan birokrat dipersonifikasikan sebagai sosok nasionalis dan Idris Rahim sebagai sosok birokrat dipersonifikasikan sebagai sosok yang religius karena keterlibatannya dalam berbagai organisasi keagamaan di Gorontalo seperti pembina PWNU Gorontalo, Dewan Masjid Indonesia, LPTQ, dan berbagai organisasi keagamaan lainnya.

Golkar dan masyarakat segera melupakan politik aliran itu. Hanya saja pada masa reformasi Partai Golkar terlanjur distigmakan sebagai partai yang bertanggung jawab atas kegagalan dan kebobrokan negara sehingga menjadikan partai ini tidak mendapat simpati dari rakyat. Dukungan yang diderikan kepada Golkar di masa lalu merupakan akibat dari kebijakan massa mengambang dari pemerintah Orde Baru untuk mengempiskan dukungan kepada partai-partai politik meski kebijakan ini kemudian memberi sumbangan terhadap hapusnya politik aliran di masa itu.

Kemenangan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo adalah keberhasilan komunikasi politik para aktor komunikasi politik Partai Golkar dan PPP yang berhasil mencitrakan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai pemimpin yang santun, baik, jujur, dan menyelesaikan segala masalah. "Citra" ini mungkin adalah suatu hal yang diimpikan masyarakat Gorontalo pada pemimpin daerahnya. Aspek-aspek nilai dari tindak dan laku Rusli Habibie-Idris Rahim ini memiliki keterkaitan dengan aspek kepemimpinan orang Gorontalo yang mengedepankan kesantunan dalam tutur kata dan penampilannya yang gagah. Aspek ini tidak lepas dari budaya masyarakat Gorontalo.

b. Konstituen

Khalayak jenis kedua adalah khalayak konstituen yakni melihat bagaimana khalayak yang selama ini menjadi simpatisan dari Partai Golkar dan PPP. Selepas Orde Baru, Partai Golkar harus menjadi partai politik dan bersaing dengan partai politik lain. Beberapa *privilege* (keistimewaan) telah dilepaskan darinya dan ratusan partai politik bertumbuhan. Meski demikian, partai politik yang tumbuh pada era reformasi bukanlah partai politik yang memiliki ideologi yang jelas.

Pertimbangan masyarakat terhadap partai politik tertentu disebabkan adanya isu-isu yang dianggap penting pada waktu itu. Misalnya isu kepedulian terhadap rakyat, isu partai politik yang dianggap jujur dan bebas KKN. Sedangkan isu-isu yang mengarahkan pada politik aliran memang tidak begitu kuat diperhatikan oleh masyarakat, seperti partai yang membawa isu Islam ataupun isu nasionalisme.

Sebagian besar masyarakat ikut kepada Partai Golkar dan PPP sebagai partai yang dikenal. Sedikit sekali masyarakat yang mengikuti Partai Golkar dan PPP sebagai partai yang jujur dan bebas

KKN. Artinya, konstituen Partai Golkar dan PPP masih melihat partai Golkar dan PPP sebagai partai yang lekat dengan Golkar dan PPP pada masa Orde Baru. Meskipun demikian, partai Golkar dan PPP tergolong sebagai partai yang memiliki kesetiaan partai yang cukup tinggi. Jelas bahwa konstituen Partai Golkar dan PPP masih melihat Partai Golkar sebagai partai layak dipilih pada tiap-tiap pemilu. Hal yang perlu dilihat adalah bahwa Partai Golkar dan PPP dalam menjalan komunikasi politiknya di Gorontalo menggunakan cara-cara baru, bahkan cenderung menghidupkan strategi komunikasi politik baru dengan mempertimbangkan perubahan iklim komunikasi politik yang dipenuhi dengan keberlimpahan informasi.

c. Opini Publik

Opini publik sangat berkaitan erat dengan politik, terutama di zaman keterbukaan seperti era reformasi ini di Indonesia. Begitu juga dengan hampir di seluruh penjuru dunia, di mana transparansi dan kebebasan dalam konteks informasi menjadi hal yang utama.³⁷ Opini publik dilihat sebagai penilaian masyarakat pada apa yang telah dilakukan oleh komunikator dalam komunikasi politik. Ini bisa dilihat sebagai hasil dari seluruh kinerja komunikasi politik dari partai politik yang nampak pada kecenderungan penentuan pilihan publik terhadap partai politik ataupun kandidat dalam pemilu. Kinerja komunikasi politik Partai Golkar dan PPP dapat dilihat melalui hasil-hasil survei berupa pencitraan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dimajukan atau pada pencitraan partai politiknya. Efek bisa dilihat semacam opini publik tentang Partai Golkar dan PPP setelah partai ini melaksanakan komunikasi politiknya.

Efek dari komunikasi politik Partai Golkar dan PPP sesungguhnya sudah nampak dari pelbagai survei yang diselenggarakan oleh pelbagai lembaga survey di Gorontalo. Secara keseluruhan hasil survei tersebut menunjukkan efek dari komunikasi politik Partai Golkar dan PPP memang telah menjadi citra partai menjadi nilai positif di mata masyarakat Gorontalo.

³⁷Raden Mas Jerry Indrawan, *Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat*, dalam Jurnal Wacana Volume 16 Nomor 2 Tahun 2017, h.172

Kesukaan yang tinggi terhadap Rusli Habibie-Idris Rahim disebabkan seringnya mereka di media massa dengan komentar yang santai dan ringan serta menyenangkan dalam pendengara khalayak Gorontalo. Hal ini juga sejalan dengan kepuasan masyarakat Gorontalo terhadap kinerja Rusli Habibie-Idris Rahim selama masih menjabat di pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusli Habibie-Idris Rahim begitu kuat dibanding tokoh manapun di Gorontalo. Sekalipun ada kandidat lain yang sedikit memiliki magnet untuk menarik perhatian public Gorontalo, tetapi tidak cukup untuk menandingi Rusli Habibie-Idris Rahim. Tingginya aspek Rusli Habibie-Idris Rahim ini sebenarnya tidak terlepas dengan tingkat kepuasan publik kepada kinerja mereka di pemerintahan yang lebih dikaitkan dengan namanya. Tingkat kepuasan inilah yang kemudian mempengaruhi tingkat keinginan publik Gorontalo untuk memilih keduanya. Hal ini menjadi keuntungan Partai Golkar dan PPP, sosok Rusli Habibie-Idris Rahim yang berpengaruh pada citra Partai Golkar dan PPP yang kemudian berpengaruh positif juga bagi Rusli Habibie-Idris Rahim karena publik Gorontalo lebih melihat citra Partai Golkar dan PPP disamping popularitas Rusli Habibie-Idris Rahim.

Mengapa Partai Golkar dan PPP serta Rusli Habibie-Idris Rahim begitu kuat? Dalam beberapa hal itu disebabkan oleh penampilannya (*appearance*) yang memukau. Di sisi lain kinerja mereka di pemerintahan cukup baik terutama di bidang politik yang mendapatkan evaluasi kinerja yang cukup baik. Keadaan ini betul-betul berimbas kepada Partai Golkar dan PPP. Kemenangan Golkar dan PPP disebabkan faktor Rusli Habibie-Idris Rahim yang begitu kuat di Gorontalo. Secara sederhana lampu yang disediakan Golkar dan PPP kalah terang oleh benderang Rusli Habibie-Idris Rahim yang melakukan pencitraan secara luar biasa, selain juga karena sering mengambil peran-peran pemerintahan yang produktif bagi pencitraan Partai Golkar dan PPP.

Sosok Rusli Habibie-Idris Rahim muncul begitu kuat pada sisi pencitraan yang positif, bahkan sejak mula dan selama kepemimpinan mereka mengedepankan penampilan yang baik, tutur kata sopan dan terukur, dan pengambilan keputusan yang tidak langsung melibatkan dirinya, sehingga untuk itu keduanya selalu harus terlibat. Karakter ini sesungguhnya sebagai pemenuhan

kebutuhan akan kepemimpinan masyarakat Gorontalo yang selalu terobsesi pada pemimpin yang berwibawa dan memiliki citra. Ini yang dipenuhi Rusli Habibie-Idris Rahim dalam sedap *public speaking* yang tampil sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dengan tutur kata teratur dan santun serta berpenampilan gagah. Nampak memang antara Rusli Habibie-Idris Rahim adalah sepasang yang memang saling melengkapi. Keduanya sebagai sosok penimbang dalam mengambil keputusan. Kedua sosok ini tidak lepas dari latar belakang masing-masingnya sebagai Bupati dan sekda Provinsi Gorontalo.

Rusli Habibie-Idris Rahim merupakan pasangan yang saling melengkapi, hal itu menjadi produktif bagi satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini keduanya berada pada posisi yang diuntungkan, karena sejak awal ia senantiasa meniatkan dirinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Efek dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dan PPP dengan mengusung Rusli Habibie-Idris Rahim meningkatkan elektabilitas keduanya, bahkan kemudian keduanya dianggap sebagai penolong oleh masyarakat Gorontalo.

E. Kesimpulan

Salah satu kekuatan kinerja komunikasi politik Partai Golkar dan PPP terdapat pada komponen komunikator. Di dalam Partai Golkar dan PPP terdapat komunikator utama dengan kredibilitas unggul. Selain itu juga hubungan antar-elit adalah faktor yang menentukan dalam keberhasilan kinerja komunikasi politik. Hubungan antar-elit ini merupakan komunikasi antar individu, yang artinya komunikasi level individu pun bisa menentukan efektivitas komunikasi politik. Komunikasi antar individu merupakan level yang paling penting dalam komunikasi antar-manusia. Dalam konteks komunikasi politik, hubungan antar-manusia yang dimaksudkan adalah hubungan interpersonal dalam menciptakan hubungan antar-elit yang harmonis.

Model komunikasi politik Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terjadi pada beberapa level, yaitu; (a) level individual, Rusli Habibie-Idris Rahim berhasil mengelola kesan dalam dirinya masing-masing secara baik. Sebagai representasi Partai Golkar dan PPP, keduanya selalu berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat Gorontalo.

Pada level kelompok, terlihat jelas bagaimana Rusli Habibie-Idris Rahim berhasil mengelola komunikasi politiknya dengan adanya harmonisasi dalam berbagai kebijakan dan pembicaraan politik. Sementara, itu keduanya intensif berkomunikasi dengan elit Partai Golkar dan PPP; (b) pada level organisasi terkena dampak lanjutan dari level kelompok, yakni bagaimana Golkar dan PPP menentukan arah politik partainya yang memposisikan diri sebagai pembela rakyat; dan (c) Pada level massa, Partai Golkar menjadi lebur dalam mitra koalisi dengan PPP, sehingga publik Gorontalo melihat setiap nilai positif dari Golkar dan PPP. Golkar dan PPP selalu mendapatkan nilai positif. Ini dikarenakan Rusli Habibie-Idris Rahim selalu maju sebagai pembela kebijakan publik.

Bibliography

- Almond, Gabriel A., dan James S. Coleman (Eds), 1960, *The Politicians of the Developing Areas*, New Jersey, Princeton University Press, Princeton
- Arrianie, Lely, 2010, *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*, Bandung, Widya Padjadjaran
- Asri, Syamsul, 2013, *Aktor Politik Kontemporer dalam Konteks Psychocultural*, dalam Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1
- Becker, Gary S., 1990, *Human Capital, Fertility, and Economic Growth* dalam *Journal of Political Economy*, Volume 98 Nomor 5
- Budiyono, 2016., *Media Sosial dan Komunikasi Politik : Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017*, Jurnal Komunikasi Volume 11 Nomor 1 (jurnal.uui.ac.id/index.php/jurnal-komunikasi/article/download/7656/)
- Dewi, Evi Ariadne Shinta, 2017., *Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik)*- Jurnal Komunikasi Volume 9 Nomor 2.

(<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1068/828>)

- Djuyandi, Yusa, 2017, *Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto dalam Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016-2021* dalam *Jurnal Wacana Politik* Volume 2 Nomor 1
- Douglas, Mary, 1973 *Natural Symbols, Explorations in Cosmology*, London, Routledge
- Gavriel, Salomon, 1997., *Of Mind and Media, How Culture's Symbolic Forms Affect Learning and Thinking* dalam *Bloomington* Volume 78 Iss. 5
(<https://search.proquest.com/openview/166a547ba6b0c96467f93587c5c5c9e4/>)
- Hardiyanto, dkk, 2016, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)* dalam *Jurnal Varia Justicia* Volume 12 Nomor 1
- Hinkle, Roscoe C., 1961, *Howard Becker's Approach to The Study of Social Change* dalam *The Sociological Quarterly* Volume 2 Nomor 3
- Indrawan, Raden Mas Jerry, 2017, *Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat*, dalam *Jurnal Wacana* Volume 16 Nomor 2
- Itiniyo, Pandri S., 2016, *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2011* dalam *Jurnal Lex Privatium* Volume IV Nomor 3
- Kuswarno, Engkus 2009 *Fenomenologi, Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Madjid, Nurcholish, 1998, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.

- McQuail, Dennis, 1992, "Political Communication" dalam Maurice Kogan (ed), *Encyclopedia of Government and Politics Vol. 1*. London: Routledge
- Meadow, Robert G., 1980 *Politics As Communication*, Noorwod, NJ: ABLEX Publishing Company
- Mulyana, Deddy, 2001, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan, 2005, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Oki Cahy, 2015, *Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Budaya* dalam Jurnal Aristo Volume 3 Nomor 1
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu; Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta; Gramedia
- Putri, Rosiana Eka, 2015, *Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis*, dalam Jurnal Jurisprudence Volume 5 Nomor 1
- Ritzer, George, 2012, *Sosiologi Ilmu Penegtahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sastrawati, Nila, 2015, *Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik*, dalam Jurnal Al-Daulah Volume 4 Nomor 1
- Surbakti, Ramlan, 1999., *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo
- Susanto, Eko Harry, 2013, *Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2

- Susanto, Eko Harry, 2016, *Komunikasi Politik dan Jajak Pendapat dalam Pemilihan Kepala Daerah*, dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi
- Sutrisno, Cucu, 2017, *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada* dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 2
- Yudhatama, Iranda, 2017., *Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15 Nomor 3 (<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2172>)